



Satu Data
Maluku Utara

BUKU PANDUAN STANDARISASI PORTAL SATU DATA MALUKU UTARA



STANDAR-MU

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN PROVINSI MALUKU UTARA

KATA PENGANTAR

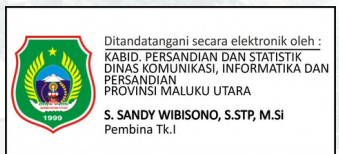
Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya, Buku Panduan Standarisasi Portal Satu Data Provinsi Maluku Utara ini dapat diselesaikan dengan baik. Selaras dengan amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Pergub Maluku Utara Nomor 40 Tahun 2022, buku ini menjadi penggerak transformasi besar untuk mengelola data pemerintah bukan lagi sekadar angka laporan internal, melainkan sebagai aset strategis daerah yang akurat, terpadu, dan mudah dibagipakaikan demi pelayanan publik yang berkualitas.

Sebagai Walidata, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Provinsi Maluku Utara berkomitmen penuh mengurai berbagai tantangan teknis yang selama ini dihadapi oleh para Operator OPD. Oleh karena itu, panduan ini dihadirkan secara praktis dan ringkas sebagai acuan baku bagi seluruh operator dalam melakukan pembersihan data (*data cleansing*) serta standarisasi format sebelum diunggah ke portal.

Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam perumusan panduan ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata yang berkelanjutan demi kemajuan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data di bumi Moloku Kie Raha.

Sofifi, Juli 2026

a.n. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
dan Persandian Provinsi Maluku utara



CATATAN:

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Dokumen ini dapat di validasi melalui aplikasi Besign Desktop, Besign dan Adobe Reader;
3. Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

GOLDEN RULES (ATURAN BAKU PENULISAN)

BAB III

STANDARISASI KODE REFERENSI

BAB IV

STRUKTUR TABEL DAN CONTOH PENERAPAN

BAB V

STANDARISASI PENGISIAN PADA PORTAL SATU DATA MALUKU UTARA

BAB VI

PENUTUP

LAMPIRAN

TAMPILAN VISUAL BENAR VS SALAH

BAB I

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel memerlukan dukungan data yang berkualitas tinggi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melangkah maju dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Satu Data Maluku Utara sebagai landasan hukum pengintegrasian seluruh data sektoral dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, proses interoperabilitas data lintas instansi masih sering terkendala oleh masalah teknis standardisasi. Kondisi ini menyebabkan sistem pembaca otomatis pada Portal Satu Data Maluku Utara mengalami eror atau salah menampilkan visualisasi grafik.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah nyata guna menyamakan persepsi dan standar teknis. Dinas Kominfosan selaku Walidata merilis buku panduan praktis ini sebagai solusi taktis di lapangan. Standardisasi data mutlak dilakukan mulai dari tahap awal pengolahan data pada Microsoft Excel oleh operator hingga proses pengisian pada portal, sehingga seluruh data sektoral Pemprov Maluku Utara tersaji secara padu, terurut, dan bebas dari anomali sistem.

DASAR HUKUM

Penyusunan dan pemberlakuan standar dalam Buku Panduan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Satu Data Maluku Utara.
3. Keputusan Kepala BPS Nomor 846 Tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

TUJUAN

1. Mewujudkan keseragaman struktur dan format file data tabel (*machine-readable*) di lingkungan Pemprov Maluku Utara.
2. Memastikan pemenuhan 4 Pilar Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah.
3. Meminimalisir tingkat penolakan (*reject*) sistem atau eror visualisasi saat proses unggah dokumen di Portal Satu Data Maluku Utara.
4. Mempermudah dan mempercepat proses interoperabilitas data lintas sektor untuk dasar pengambilan kebijakan daerah.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam buku panduan ini dibatasi pada aspek-aspek teknis berikut untuk menjamin efektivitas standarisasi data:

- **Substansi Panduan:** Panduan ini khusus mengatur standarisasi data sektoral agar memenuhi kriteria *machine-readable* dengan format berkas (.xlsx atau .csv). Pembahasan berfokus pada *Golden Rules* (Aturan Baku Penulisan), penerapan Kode Referensi wilayah berbasis Peraturan Kemendagri, serta standar pengisian pada Portal Satu Data Maluku Utara.
- **Subjek Sasaran:** Ketentuan dalam panduan ini berlaku dan wajib diikuti oleh seluruh Operator Pengelola Data (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam kapasitasnya sebagai Operator Pengelola Data Statistik Sektoral.
- **Lokus (Cakupan Data):** Ruang lingkup spasial data sektoral yang diatur dalam standarisasi ini dibatasi pada ruang lingkup wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara

BAB II

GOLDEN RULES (ATURAN BAKU PENULISAN)

Sebelum mengunggah data ke Portal Satu Data Maluku Utara, Operator Pengelola Data (OPD) wajib memastikan seluruh data telah memenuhi 8 golden rules berikut:

1

Tidak Diperbolehkan Menggunakan Merge Cell

Aturan: Seluruh baris dan kolom harus bersifat mandiri. Tidak diperbolehkan menggabungkan sel (merge cells) di bagian mana pun dalam tabel data, baik pada baris judul kolom (header) maupun isi data.

Contoh Salah



	A	B	C	D	E	F
1		Wilayah Data		Nilai Indeks		
2	No	Kode Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota	Nilai	Satuan	Tahun
3	1	82.01	Kab. Halmahera Barat	1,9	Indeks	2024
4	2	82.02	Kab. Halmahera Tengah	1,9		
5	3	82.03	Kab. Kepulauan Sula	2,06		
6	4	82.04	Kab. Halmahera Selatan	2,43		
7	5	82.05	Kab. Halmahera Utara	2,73		
8	6	82.06	Kab. Halmahera Timur	1,38		
9	7	82.07	Kab. Pulau Morotai	1,97		
10	8	82.08	Kab. Pulau Taliabu	2,09		
11	9	82.72	Kota Tidore Kepulauan	2,32		
12	10	82.71	Kota Ternate	1,89		

Contoh Benar



	A	B	C	D	E	F
1	No	Kode Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota	Nilai	Satuan	Tahun
2	1	82.01	Kab. Halmahera Barat	1,9	Indeks	2024
3	2	82.02	Kab. Halmahera Tengah	1,9	Indeks	2024
4	3	82.03	Kab. Kepulauan Sula	2,06	Indeks	2024
5	4	82.04	Kab. Halmahera Selatan	2,43	Indeks	2024
6	5	82.05	Kab. Halmahera Utara	2,73	Indeks	2024
7	6	82.06	Kab. Halmahera Timur	1,38	Indeks	2024
8	7	82.07	Kab. Pulau Morotai	1,97	Indeks	2024
9	8	82.08	Kab. Pulau Taliabu	2,09	Indeks	2024
10	9	82.72	Kota Tidore Kepulauan	2,32	Indeks	2024
11	10	82.71	Kota Ternate	1,89	Indeks	2024

2

Struktur *Tidy Data*

Aturan: Satu kolom hanya boleh berisi satu jenis karakteristik variabel. Tabel harus memanjang ke bawah (vertikal), bukan melebar ke samping (horizontal) dan setiap kolom hanya memuat satu jenis karakteristik variabel.

Contoh Salah



	A	B	C	D
1	No	Indikator	Kab. Halmahera Barat	Kab. Halmahera Tengah
2	1	Nilai	1,9	1,9
3	2	Satuan	Indeks	Indeks
4	3	Tahun	2024	2024

salah karena tabel melebar ke samping

Contoh Benar



	A	B	C	D	E	F
1	No	Kode Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota	Nilai	Satuan	Tahun
2	1	82.01	Kab. Halmahera Barat	1,9	Indeks	2024
3	2	82.02	Kab. Halmahera Tengah	1,9	Indeks	2024
4	3	82.03	Kab. Kepulauan Sula	2,06	Indeks	2024
5	4	82.04	Kab. Halmahera Selatan	2,43	Indeks	2024
6	5	82.05	Kab. Halmahera Utara	2,73	Indeks	2024
7	6	82.06	Kab. Halmahera Timur	1,38	Indeks	2024
8	7	82.07	Kab. Pulau Morotai	1,97	Indeks	2024
9	8	82.08	Kab. Pulau Taliabu	2,09	Indeks	2024
10	9	82.72	Kota Tidore Kepulauan	2,32	Indeks	2024
11	10	82.71	Kota Ternate	1,89	Indeks	2024

3

Wajib Menyertakan Kolom Nomor Urut (No) sebagai Kolom Pertama

Aturan: Kolom paling pertama (Kolom A) pada tabel wajib berupa nomor urut angka (1,2,3, dst.). Fungsinya sebagai penjamin agar urutan penyajian data di portal tidak acak-acakan.

Contoh Salah



	A	B	C	D	E
1	Kode Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota	Nilai	Satuan	Tahun
2	82.01	Kab. Halmahera Barat	1,9	Indeks	2024
3	82.02	Kab. Halmahera Tengah	1,9	Indeks	2024
4	82.03	Kab. Kepulauan Sula	2,06	Indeks	2024
5	82.04	Kab. Halmahera Selatan	2,43	Indeks	2024
6	82.05	Kab. Halmahera Utara	2,73	Indeks	2024
7	82.06	Kab. Halmahera Timur	1,38	Indeks	2024
8	82.07	Kab. Pulau Morotai	1,97	Indeks	2024
9	82.08	Kab. Pulau Taliabu	2,09	Indeks	2024
10	82.72	Kota Tidore Kepulauan	2,32	Indeks	2024
11	82.71	Kota Ternate	1,89	Indeks	2024

salah karena tidak ada kolom Nomor Urut (No)

Contoh Benar



	A	B	C	D	E	F
1	No	Kode Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota	Nilai	Satuan	Tahun
2	1	82.01	Kab. Halmahera Barat	1,9	Indeks	2024
3	2	82.02	Kab. Halmahera Tengah	1,9	Indeks	2024
4	3	82.03	Kab. Kepulauan Sula	2,06	Indeks	2024
5	4	82.04	Kab. Halmahera Selatan	2,43	Indeks	2024
6	5	82.05	Kab. Halmahera Utara	2,73	Indeks	2024
7	6	82.06	Kab. Halmahera Timur	1,38	Indeks	2024
8	7	82.07	Kab. Pulau Morotai	1,97	Indeks	2024
9	8	82.08	Kab. Pulau Taliabu	2,09	Indeks	2024
10	9	82.72	Kota Tidore Kepulauan	2,32	Indeks	2024
11	10	82.71	Kota Ternate	1,89	Indeks	2024

4

Struktur Penulisan Kepala Tabel (Header)

Aturan:

- **Berada pada baris pertama dari setiap tabel.** Hapus semua judul laporan di bagian atas tabel (seperti tulisan "Dinas A - Laporan Tahun 2026"). Judul ini nanti dimasukkan ke kolom Nama Dataset di dasbor, bukan di dalam file Excel.
- **Nama kolom harus ringkas dan maksimal terdiri dari 3 sampai 4 kata** agar tampilan tabel tidak melebar secara berlebihan.
- **Menggunakan Tittle Case** (Huruf Kapital di Awal Kata). Contoh: Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Angka Kelahiran.
- **Pengecualian huruf kapital untuk singkatan baku.** Apabila nama kolom mengandung singkatan resmi (akronim/inisial) yang sudah baku secara nasional, sektoral, atau kedinasan, maka singkatan tersebut wajib ditulis dengan huruf kapital seluruhnya (UPPERCASE). Contoh: Realisasi Anggaran SIPD, Jumlah Peserta PBI JKN, Capaian Indeks IPM, Nilai PDRB Sektor Pertanian, Target Pendapatan PAD.

Contoh Benar



	A	B	C	D	E	F
1	No	Kode Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota	Nilai	Satuan	Tahun
2	1	82.01	Kab. Halmahera Barat	1,9	Indeks	2024
3	2	82.02	Kab. Halmahera Tengah	1,9	Indeks	2024
4	3	82.03	Kab. Kepulauan Sula	2,06	Indeks	2024
5	4	82.04	Kab. Halmahera Selatan	2,43	Indeks	2024
6	5	82.05	Kab. Halmahera Utara	2,73	Indeks	2024
7	6	82.06	Kab. Halmahera Timur	1,38	Indeks	2024
8	7	82.07	Kab. Pulau Morotai	1,97	Indeks	2024
9	8	82.08	Kab. Pulau Taliabu	2,09	Indeks	2024
10	9	82.72	Kota Tidore Kepulauan	2,32	Indeks	2024
11	10	82.71	Kota Ternate	1,89	Indeks	2024

5

Struktur Penulisan Isi Data (Baris Kedua dst)

Aturan:

- **Dimulai pada baris kedua dari setiap tabel.**
- **Menggunakan Sentence case** (Huruf Kapital di Awal Kalimat).
- **Kolom Angka** (Format Numerik)
 1. **Wajib diisi angka saja**, tidak boleh memasukkan satuan seperti unit, jiwa, persen, rupiah dan lainnya. Satuan wajib diletakkan dalam header kolom atau judul data. Contoh: 1250, 450, 82.
 2. **Dilarang menggunakan tanda baca pemisah** (titik atau koma) pada angka ribuan, jutaan, dst. Contoh: 1500000.
 3. **Angka desimal wajib menggunakan tanda koma (,)** bukan titik (.) dengan batas maksimal 2 angka dibelakang koma. Contoh: 2,07

Contoh Salah



	A
1	Jumlah
2	12.000 Jiwa
3	450 Unit
4	82%

	A	B
1	Nilai	Satuan
2	1.00	Indeks
3	2.47	Indeks
4	2.49	Indeks
5	2.69	Indeks
6	3.06	Indeks

Salah karena angka ditulis menggunakan tanda pemisah dan bersamaan dengan satuan.

Penulisan desimal masih menggunakan tanda titik (.)

Contoh Benar



	A	B
1	Jumlah	Satuan
2	12000	Jiwa
3	450	Unit
4	82	Persen

	A	B
1	Nilai	Satuan
2	1,00	Indeks
3	2,47	Indeks
4	2,49	Indeks
5	2,69	Indeks
6	3,06	Indeks

Ditulis menggunakan angka tanpa tanda pemisah dan tidak digabung dengan satuan.

Penulisan desimal menggunakan tanda koma (,)

- **Penanganan cell kosong** (missing value). Jika data memang bernilai nol, ketik angka 0 dalam cell. Jika data belum tersedia/tidak tercatat, kosongkan saja, jangan mengisi dengan tanda strip (-) atau lainnya.
- **Tidak diperbolehkan menambahkan baris “total”, “jumlah”, “rata-rata”, atau lainnya di bagian bawah tabel.**
- **Tidak boleh menambahkan atribusi tanda tangan, nama pejabat, atau catatan kaki.** Bagian bawah tabel wajib bersih sepenuhnya dari teks tanda tangan kepala dinas, nama pejabat, NIP, garis pembatas penutup, atau catatan kaki manual lainnya.

Contoh Benar



	A	B	C	D	E	F
1	No	Kode Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan Rawan Pangan	Satuan	Tahun
2	1	82.01	Kab. Halmahera Barat	3	Kecamatan	2025
3	2	82.02	Kab. Halmahera Tengah	5	Kecamatan	2025
4	3	82.03	Kab. Kepulauan Sula	5	Kecamatan	2025
5	4	82.04	Kab. Halmahera Selatan	21	Kecamatan	2025
6	5	82.05	Kab. Halmahera Utara	1	Kecamatan	2025
7	6	82.06	Kab. Halmahera Timur	4	Kecamatan	2025
8	7	82.07	Kab. Pulau Morotai	2	Kecamatan	2025
9	8	82.08	Kab. Pulau Taliabu	8	Kecamatan	2025
10	9	82.71	Kota Ternate	0	Kecamatan	2025
11	10	82.72	Kota Tidore Kepulauan	0	Kecamatan	2025

Benar karena mengisi cell yang nilainya nol dengan menulis angka '0', serta tidak menambahkan baris total, dan catatan kaki di bagian bawah tabel

BAB III

STANDARISASI KODE REFERENSI



KODE REFERENSI WILAYAH

Untuk mewujudkan prinsip Interoperabilitas Data (bagi pakai data lintas sektor) serta menghindari kesalahan penulisan wilayah administrasi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan Kode Wilayah Kementerian Dalam Negeri sebagai basis kode referensi data induk.

Setiap Operator Pengelola Data (OPD) wajib mengisi kolom nama wilayah dengan kode referensi resmi dengan ketentuan struktur sebagai berikut:

- 1. **Struktur Format Kode Kemendagri**
 - Tingkat Provinsi: Kode referensi dikunci pada angka 82 dengan penulisan nama wilayah Maluku Utara.
- 2. **Penulisan Kode & Nama Resmi Kabupaten/Kota se-Maluku Utara**
 - Penulisan nama wilayah pada isi data wajib ditulis menggunakan Tittle Case (Huruf Kapital di Awal Kata) diawali dengan penanda Kab. atau Kota. Tidak diperbolehkan disingkat secara kreatif (Misal: menulis Halsel, Halteng, Sula, dst).

Kode Wilayah (Kemendagri)	Penulisan Nama Kabupaten/Kota yang Benar
82.01	Kab. Halmahera Barat
82.02	Kab. Halmahera Tengah
82.03	Kab. Kepulauan Sula
82.04	Kab. Halmahera Selatan
82.05	Kab. Halmahera Utara
82.06	Kab. Halmahera Timur
82.07	Kab. Pulau Morotai
82.08	Kab. Pulau Taliabu
82.71	Kota Ternate
82.72	Kota Tidore Kepulauan

BAB IV

STRUKTUR TABEL DAN CONTOH PENERAPAN

Case 1: Tabel Data Berdasarkan Kabupaten/Kota

Case 1	Kolom	Nama Header	Keterangan
Jika data "Berdasarkan Kabupaten/Kota" di Provinsi Maluku Utara.	Cell A1	No	(kolom nomor urut)
	Cell B1	Kode Kabupaten/Kota	Untuk daftar kode dan nama wilayah dapat dilihat pada Bab III
	Cell C1	Nama Kabupaten/Kota	
	Cell D1	(nama pengukuran dataset, dijelaskan perhitungannya)	Jumlah Kecamatan Rawan Pangan
	Cell E1	Satuan (satuan pengukuran dataset)	Kecamatan
	Cell F1	Tahun (tahun produksi data)	2025

Format Penulisan Header dan Isi Data Berdasarkan Case 1 dengan Mengambil Contoh Data Jumlah Kecamatan Rawan Pangan Tahun 2025 dari Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.

	A	B	C	D	E	F
1	No	Kode Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan Rawan Pangan	Satuan	Tahun
2	1	82.01	Kab. Halmahera Barat	3	Kecamatan	2025
3	2	82.02	Kab. Halmahera Tengah	5	Kecamatan	2025
4	3	82.03	Kab. Kepulauan Sula	5	Kecamatan	2025
5	4	82.04	Kab. Halmahera Selatan	21	Kecamatan	2025
6	5	82.05	Kab. Halmahera Utara	1	Kecamatan	2025
7	6	82.06	Kab. Halmahera Timur	4	Kecamatan	2025
8	7	82.07	Kab. Pulau Morotai	2	Kecamatan	2025
9	8	82.08	Kab. Pulau Taliabu	8	Kecamatan	2025
10	9	82.71	Kota Ternate	0	Kecamatan	2025
11	10	82.72	Kota Tidore Kepulauan	0	Kecamatan	2025

Case 2: Tabel Data Berdasarkan 1 atau Lebih Jenis Kategori

Case 2	Kolom	Nama Header	Keterangan
Jika data "Berdasarkan 1 Atau Lebih Jenis Kategori" dan memiliki variabel Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku utara.	Cell A1	No	(kolom nomor urut)
	Cell B1	Kode Kabupaten/Kota	Untuk daftar kode
	Cell C1	Nama Kabupaten/Kota	dan nama wilayah dapat dilihat pada Bab III
	Cell D1	(nama kategori 1)	Wisatawan Nusantara
	Cell E1	(nama kategori 2)	Wisatawan Mancanegara
	Cell F1	(nama pengukuran dataset, dijelaskan perhitungan datanya)	Total Wisatawan
	Cell G1	Satuan (satuan pengukuran dataset)	Orang
	Cell H1	Tahun (tahun produksi data)	2024

Format Penulisan Header dan Isi Data Berdasarkan Case 2 dengan Mengambil Contoh Data Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara

#	A	B	C	D	E	F	G	H
1	No	Kode Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Total Wisatawan	Satuan	Tahun
2	1	82.71	Kota Ternate	265336	2256	267592	Orang	2024
3	2	82.72	Kota Tidore Kepulauan	9783	20	9803	Orang	2024
4	3	82.01	Kab. Halmahera Barat	8900	113	9013	Orang	2024
5	4	82.06	Kab. Halmahera Timur	2102	43	2145	Orang	2024
6	5	82.04	Kab. Halmahera Selatan	2701	436	3137	Orang	2024
7	6	82.05	Kab. Halmahera Utara	24936	236	25172	Orang	2024
8	7	82.02	Kab. Halmahera Tengah	27501	3	27504	Orang	2024
9	8	82.07	Kab. Pulau Morotai	6482	147	6629	Orang	2024
10	9	82.03	Kab. Kepulauan Sula	7260	2	7262	Orang	2024
11	10	82.08	Kab. Pulau Taliabu	3885	0	3885	Orang	2024

Case 3: Tabel Data Agregat Tingkat Provinsi

Digunakan untuk data makro indikator tingkat provinsi saja yang tidak bisa di-breakdown (diturunkan) ke tingkat Kabupaten/Kota di bawahnya.

Case 3	Kolom	Nama Header	Keterangan
Jika data merupakan "Data Agregat Tingkat Provinsi" di Provinsi Maluku Utara	Cell A1	No	(kolom nomor urut)
	Cell B1	Kode Provinsi	Isi data '82'
	Cell C1 dst	Nama Provinsi	Isi data 'Maluku Utara'
		(d disesuaikan dengan kategori dari data tersebut)	Nilai Aset Tetap
		Satuan (satuan pengukuran dataset)	Rupiah
		Tahun (tahun produksi data)	2023; 2024; 2025

Format Penulisan Header dan Isi Data Berdasarkan Case 3 dengan Mengambil Contoh Data Nilai Aset Tetap Pemerintah Daerah sesuai Audited Neraca dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara

	A	B	C	D	E	F
1	No	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Nilai Aset Tetap	Satuan	Tahun
2	1	82	Maluku Utara	6506069556996	Rupiah	2025
3	2	82	Maluku Utara	6486013774598,70	Rupiah	2024
4	3	82	Maluku Utara	6041011282514,80	Rupiah	2023

BAB V

STANDARISASI PENGISIAN PADA PORTAL SATU DATA MALUKU UTARA

The screenshot displays the 'SATUDATA' portal interface. On the left is a dark teal sidebar with navigation links: Dashboard, Dataset (selected), Template, Infografis, Panduan, Profil saya, and Keluar. The main content area features a 'Tambah Dataset' modal form with a green header and a close button. The form contains the following fields, each highlighted with an orange circle and a number:

1. Judul Dataset (Text input)
2. Deskripsi (Text input)
3. Tingkat Penyajian (Dropdown menu, example: 'Provinsi, Kabupaten')
4. Cakupan Wilayah (Dropdown menu, example: 'Maluku Utara')
5. Organisasi (Dropdown menu, 'Pilih Organisasi')
6. Sektoral (Dropdown menu, 'Pilih Sektoral')

At the bottom of the form are 'Tutup' and 'Simpan' buttons. In the background, a table of datasets is partially visible, including entries like 'Melakukan Penerbitan Berikat Elektronik' and 'Persandian (DISKOMINFOSAN)'.

Ketika operator pengelola data sudah login menggunakan akun dan password yang diberikan, lalu ke menu dataset dan ke bagian tambah dataset, OPD wajib mengisi kolom-kolom diatas dengan standar aturan berikut:

1

Judul Dataset

Kolom ini menentukan kemudahan pencarian data oleh masyarakat secara konseptual dan jangka panjang di Portal Satu Data Maluku Utara. Satu dataset berfungsi sebagai "**Rumah Besar**" yang akan menampung berbagai file data dari tahun ke tahun.

- **Aturan:** Harus mencerminkan formula [Nama Indikator/Data] + di Provinsi Maluku Utara.
- **Penulisan:** Wajib menggunakan format Huruf Kapital di Setiap Awal Kata (Title Case), dengan pengecualian pada Kata Tugas (kata hubung, kata depan, dan kata perluas seperti dan, yang, di, ke, dari, atau, untuk, dalam) dan huruf kapital untuk singkatan baku. Kata tugas tersebut wajib ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika berada di awal kalimat judul.
- **Contoh:** Jumlah Sarana Perpustakaan pada Satuan Pendidikan SMA di Provinsi Maluku Utara, Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Maluku Utara.



CATATAN PENTING

Judul Dataset **tidak boleh** menggunakan tahun, karena folder ini dirancang untuk menampung arsip data dari berbagai tahun sekaligus.



2

Deskripsi

Kolom teks naratif untuk menjelaskan maksud dari isi tabel agar pengguna data tidak salah paham.

- **Aturan:** Minimal terdiri dari 2 kalimat yang menjelaskan definisi operasional indikator dan tujuan pencatatan data tersebut. Berisi maksimal 500 karakter termasuk spasi.
- **Contoh:** Dataset ini memuat data tentang jumlah penyuluh kehutanan yang bertugas di bawah naungan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Data ini digunakan untuk memantau rasio kecukupan penyuluh di setiap wilayah kabupaten/kota.

3

Tingkat Penyajian

Kolom skala atau level visualisasi geografis dari isi data.

- **Aturan:** Operator harus memilih tingkat kedalaman data terkecil yang disajikan di dalam tabel. Pilihan wajib yang seragam:
 - **Provinsi:** Jika data hanya menyajikan angka total Provinsi Maluku Utara.
 - **Kabupaten/Kota:** Jika isi data memecah angka per 10 Kabupaten/Kota di Malut.

4

Cakupan Wilayah

Kolom teks penjelas wilayah administrasi yang di-cover oleh dataset.

- **Aturan:** Tidak diperbolehkan mengisi dengan tanda strip (-).
- **Wajib diisi dengan:** Seluruh Wilayah Provinsi Maluku Utara atau Sebagian Wilayah Provinsi Maluku Utara

5 Organisasi

Kolom penentu instansi penanggung jawab data.

- **Aturan:** Operator wajib memilih nama resmi OPD-nya masing-masing.
- **Contoh:** Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DISKOMINFOSAN)

6 Sektoral

Kolom Sektoral wajib dipilih sesuai dengan urusan dan substansi data yang dihasilkan oleh OPD, bukan berdasarkan nama instansi penciptanya. Silakan pilih salah satu dari 12 rumpun sektoral berikut:

1. Infrastruktur

- **Definisi:** Segala data terkait fasilitas fisik, konstruksi, fasilitas umum, jaringan utilitas, telekomunikasi, dan tata ruang.
- **Contoh Data:** Proporsi Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik di Provinsi Maluku Utara

2. Kependudukan

- **Definisi:** Data kuantitatif mengenai struktur, jumlah, persebaran, ciri-ciri, dan administrasi warga.
- **Contoh Data:** Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

3. Ekonomi dan Industri

- **Definisi:** Data perdagangan, pasar, investasi, keuangan daerah, aktivitas UMKM, industri manufaktur, dan koperasi.
- **Contoh Data:** Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

4. Pendidikan Dan Tenaga Kerja

- **Definisi:** Segala data proses belajar-mengajar, sarana sekolah, angkatan kerja, pengangguran, dan jaminan ketenagakerjaan.
- **Contoh Data:** Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

5. Kesehatan

- **Definisi:** Data layanan medis, penyakit, fasilitas kesehatan, gizi masyarakat, dan penunjang hidup sehat.
- **Contoh Data:** Prevalensi Stunting pada Balita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

6. Pemerintahan dan Desa

- **Definisi:** Data birokrasi, aparatur sipil negara (ASN), keuangan desa, pelayanan publik pemerintah, dan wilayah administratif.
- **Contoh Data:** Persentase Desa Berstatus Mandiri menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

7. Pariwisata dan Budaya

- **Definisi:** Data objek wisata, kunjungan pelancong, perhotelan, cagar budaya, kesenian, dan kearifan lokal.
- **Contoh Data:** Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Asing di Provinsi Maluku Utara.

8. Sosial

- **Definisi:** Data kesejahteraan sosial, penanganan kemiskinan, penyandang disabilitas, perlindungan anak, dan bencana sosial/alam.
- **Contoh Data:** Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Provinsi Maluku Utara.

9. Lingkungan dan Sumber Daya Alam

- **Definisi:** Data kebersihan, persampahan, kehutanan, polusi, iklim, hidrologi, dan pengelolaan energi.
- **Contoh Data:** Indeks Kualitas Udara menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

10. Transportasi

- **Definisi:** Data pergerakan kendaraan, sarana dan prasarana angkutan darat, laut, udara, serta keselamatan lalu lintas.
- **Contoh Data:** Jumlah Penumpang Kapal Laut melalui Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Maluku Utara.

11. Politik dan Keamanan

- **Definisi:** Data pelaksanaan demokrasi, ketertiban umum, penegakan perda, konflik, dan kesadaran hukum masyarakat.
- **Contoh Data:** Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di Provinsi Maluku Utara.

12. Kemaritiman

- **Definisi:** Data potensi kelautan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
- **Contoh Data:** Volume Produksi Perikanan Tangkap menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.



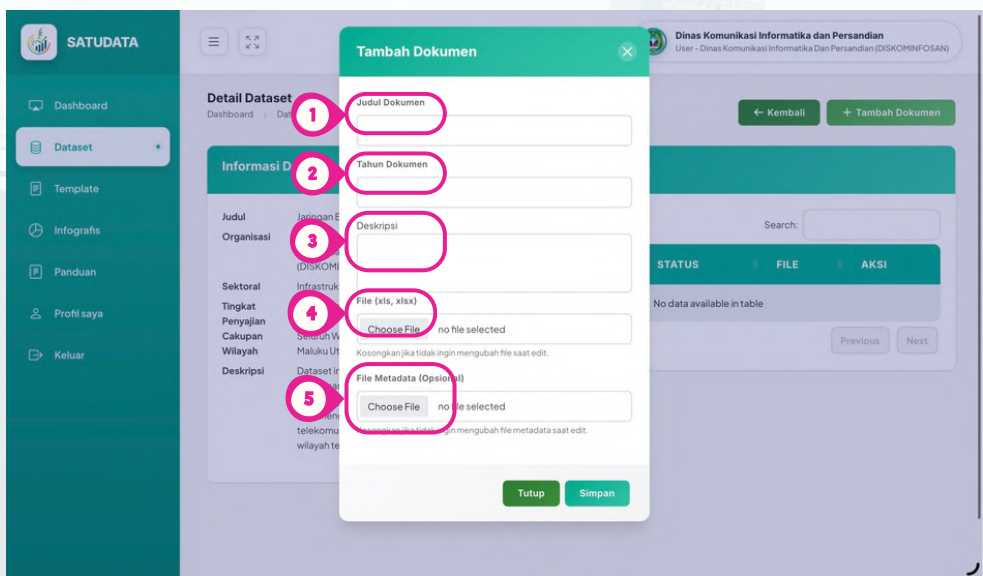
ATURAN PENTING

Satu instansi OPD bisa memilih rumpun sektoral yang berbeda tergantung isi data yang mereka upload.



CONTOH

Dinas Sosial jika mengunggah data bantuan kemiskinan memilih sektor Sosial. Namun, jika mereka mengunggah data jumlah pegawai internalnya, mereka wajib memilih sektor Pemerintahan dan Desa.



Setelah itu, ketika operator mengklik bagian ‘+ Tambah Dokumen’, jendela pop-up akan muncul seperti gambar diatas dan wajib diisi dengan ketentuan standar aturan sebagai berikut:

1 Judul Dokumen

Kolom ini menentukan kejelasan nama file tabel data publik saat diunduh masyarakat nantinya. Judul dokumen bersifat spesifik, dinamis, merujuk langsung pada isi file (xls, xlsx).

- **Ketentuan Penulisan:** Wajib menggunakan format Huruf Kapital di Setiap Awal Kata (Title Case), dengan pengecualian pada Kata Tugas (kata hubung, kata depan, dan kata perluas seperti dan, yang, di, ke, dari, atau, untuk, dalam). Kata tugas tersebut wajib ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika berada di awal kalimat judul.



Variasi Penulisan Judul Dokumen (Berdasarkan Isi File)

Kondisi 1: Data Kewilayahan

- **Situasi:** Digunakan jika OPD memiliki data Provinsi dan rincian Kabupaten/Kota. Sesuai standar, kedua data ini wajib dipisah menjadi dua file Excel yang berbeda.
- **Aturan:** Operator wajib mengunggah dua file dokumen secara bergantian ke dalam wadah dataset yang sama dengan rumus judul:
 - File 1 (Khusus Provinsi): [Nama Indikator] + Pemerintah Provinsi Maluku Utara + Tahun [Tahun]
 - File 2 (Khusus Kabupaten/Kota): [Nama Indikator] + Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara + Tahun [Tahun]
- **Contoh:**
 - File 1: Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
 - File 2: Indeks SPBE Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Kondisi 2: Data Makro Provinsi (Tanpa Rincian Daerah)

- **Situasi:** Digunakan jika dari awal OPD memang hanya memproduksi satu data makro untuk tingkat provinsi (tidak memiliki versi kabupaten sama sekali).
- **Aturan:** Karena hanya ada satu file tunggal, judul dokumen langsung merujuk pada indikator provinsi tersebut.
- **Rumus:** [Nama Indikator] + di Provinsi Maluku Utara + Tahun [Tahun]
- **Contoh:** Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Kondisi 3: File Berisi Data Beberapa Tahun Sekaligus

- **Situasi:** Digunakan jika file Excel yang diunggah menyajikan data historis beberapa tahun sekaligus (baik untuk file versi Provinsi saja, maupun file versi Kabupaten/Kota).
- **Contoh:** Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2025



Deskripsi

Kolom teks naratif yang berfungsi sebagai penjelasan instan atau kamus data ringkas bagi pengguna data.

- **Aturan:** Wajib diisi minimal 1 kalimat utuh. Tidak diperbolehkan mengisi kolom ini hanya dengan tanda strip (-) maupun titik (.). Berisi maksimal 250 karakter termasuk spasi.
- **Contoh Benar:** Dokumen ini memuat data mengenai jumlah ketersediaan portal resmi dan situs web milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memenuhi standar aksesibilitas dan keamanan informasi. Data ini digunakan untuk memonitor kemajuan digitalisasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.



File (xls, xlsx)

Tombol unggah (upload) berkas tabel data utama hasil produsen data OPD.

- **Aturan:** Format file wajib bertipe .xls atau .xlsx (Microsoft Excel).
- **Kriteria Kelayakan Berkas:** File yang diunggah adalah file Excel yang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disampaikan sebelumnya.



File Metadata

Tombol untuk mengunggah dokumen pendukung teknis berupa karakteristik struktur data.

- **Aturan:** Berdasarkan amanat penegakan standar SDI Provinsi Maluku Utara, operator OPD wajib mengunggah dokumen metadata terpadu yang menyatukan Metadata Kegiatan, Metadata Variabel, dan Metadata Indikator ke dalam 1 file gabungan berformat .pdf.

BAB V

PENUTUP

Buku Panduan Standarisasi Portal Satu Data Maluku Utara (STANDAR-MU) ini hadir sebagai panduan kerja bagi seluruh Operator Pengelola Data (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Langkah-langkah dalam buku panduan ini merupakan fondasi krusial dalam menyajikan data sektoral yang *machine-readable*, terpadu, dan bebas dari anomali sistem demi menegakkan prinsip Satu Data Indonesia di bumi *Moloku Kie Raha*.

Keberhasilan dan keberlanjutan tata kelola data yang andal di daerah ini pada akhirnya bersandar pada dedikasi serta konsistensi para operator di lapangan. Ketika data sektoral tersaji secara valid dan mutakhir, pimpinan daerah akan memiliki basis data yang kuat untuk merumuskan kebijakan pembangunan makro yang tepat sasaran.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Provinsi Maluku Utara selaku Walidata akan selalu siap mendampingi dan bersinergi dengan seluruh Perangkat Daerah sebagai Produsen Data. Mari kita jadikan panduan standarisasi ini sebagai budaya kerja baru dan bergerak bersama sebagai motor perubahan di era digital. Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, mari kita wujudkan Satu Data Maluku Utara yang valid, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi kemajuan masyarakat.

LAMPIRAN

TAMPILAN VISUAL BENAR VS SALAH

SALAH



Masih ada merge cell

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	No	Nama Instansi	Domain SPBE				Indeks	Predikat
2			D1	D2	D3	D4		
3	1	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	3	2.1	1.64	3.3	2.69	Baik
4	2	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	1	1.1	1	2.92	1.9	Cukup
5	3	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	1	1.1	1	2.92	1.9	Cukup
6	4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	3	1.2	1	2.65	2.06	Cukup
7	5	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	2	2.1	1	3.25	2.43	Cukup
8	6	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	3.1	2.1	1.27	3.49	2.73	Baik
9	7	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	2	1.3	1.18	1.31	1.38	Kurang
10	8	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	1	1.1	1	3.03	1.97	Cukup
11	9	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	2.7	1	1	2.92	2.09	Cukup
12	10	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	3	1.3	1	3.17	2.32	Cukup
13	11	Pemerintah Kota Ternate	1.8	1	1	2.47	1.89	Cukup

Data Provinsi masih digabung dengan data Kabupaten/Kota

Masih ada data teknis internal yang tidak perlu disajikan

Penulisan nama wilayah masih belum sesuai dengan standar penulisan yang ditentukan

Angka desimal masih menggunakan tanda pemisah titik (.)

Masih belum ada Kode Referensi Wilayah

Masih belum ada kolom Satuan dan Tahun

BENAR



Data Provinsi dan Kab/Kota dipisah menjadi 2 file

File 1

	A	B	C	D	E	F	G
1	No	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Nilai	Satuan	Predikat	Tahun
2	1	82	Maluku Utara	2,69	Indeks	Baik	2024

File 2

Tidak ada *merge cell*

	A	B	C	D	E	F	G
1	No	Kode Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten Kota	Nilai	Satuan	Predikat	Tahun
2	1	82.01	Kab. Halmahera Barat	1,9	Indeks	Cukup	2024
3	2	82.02	Kab. Halmahera Tengah	1,9	Indeks	Cukup	2024
4	3	82.03	Kab. Kepulauan Sula	2,06	Indeks	Cukup	2024
5	4	82.04	Kab. Halmahera Selatan	2,43	Indeks	Cukup	2024
6	5	82.05	Kab. Halmahera Utara	2,73	Indeks	Baik	2024
7	6	82.06	Kab. Halmahera Timur	1,38	Indeks	Kurang	2024
8	7	82.07	Kab. Pulau Morotai	1,97	Indeks	Cukup	2024
9	8	82.08	Kab. Pulau Taliabu	2,09	Indeks	Cukup	2024
10	9	82.71	Kota Ternate	2,32	Indeks	Cukup	2024
11	10	82.72	Kota Tidore Kepulauan	1,89	Indeks	Cukup	2024

Penambahan kolom
Kode Wilayah

Penulisan Kode dan
Nama Wilayah sudah
sesuai standar

Angka desimal
menggunakan tanda
pemisah koma (,)

Penambahan
kolom Satuan
dan Tahun

SALAH



Tambah Dataset

Judul Dataset
INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH

Deskripsi
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan dan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi digital pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah di Indonesia

Tingkat Penyajian
2

Cakupan Wilayah
Misal: Maluku Utara

Organisasi
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DISKOMINFOSAN)

Sektoral
Pemerintahan dan Desa

Tutup Simpan

Judul dataset belum sesuai formula penulisan dan masih menggunakan UPPERCASE (Huruf Kapital)

Deskripsi hanya terdiri dari 1 kalimat dan belum ada tujuan pencatatan data

Operator OPD belum mengisi Cakupan Wilayah

Operator OPD belum memilih tingkat kedalaman data terkecil yang disajikan

BENAR



Judul dataset sudah sesuai formula penulisan dan menggunakan Tittle Case

Tambah Dataset

Judul Dataset
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah di Provinsi Maluku Utara

Deskripsi
Indeks SPBE adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan dan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi digital pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah di Indonesia. Data ini digunakan sebagai indikator evaluasi efektivitas transformasi digital dan penerapan tata kelola birokrasi modern di Provinsi Maluku Utara.

Tingkat Penyajian
Kabupaten/Kota

Cakupan Wilayah
Seluruh Wilayah Provinsi Maluku Utara

Organisasi
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DISKOMINFOSAN)

Sektoral
Pemerintahan dan Desa

Tutup Simpan

Deskripsi sudah terdiri dari 2 kalimat yang berisi definisi dan tujuan pencatatan data

Operator OPD sudah mengisi Cakupan Wilayah

Operator OPD sudah memilih tingkat kedalaman data terkecil yang disajikan

SALAH



Tambah Dokumen

Judul Dokumen

INDEKS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PE

Judul dokumen masih menggunakan UPPERCASE

Tahun Dokumen

2024

Deskripsi

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan dan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi digital pada instansi pemerintah, baik

Deskripsi masih terlalu panjang

File (xls, xlsx)

Choose File

Data SPBE Kabupa...:Kota 2024.xlsx

Kosongkan jika tidak ingin mengubah file saat edit.

File Metadata (Opsional)

Choose File

no file selected

Kosongkan jika tidak ingin mengubah file metadata saat edit.

Operator OPD belum mengunggah file metadata

Tutup

Simpan

BENAR



Tambah Dokumen



Judul Dokumen

Indeks SPBE Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota di Provi

Tahun Dokumen

2024

Deskripsi

Dokumen ini memuat nilai indeks dan predikat kematangan domain SPBE khusus untuk lingkup instansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.

File (xls, xlsx)

Choose File

Data SPBE Kabupa...Kota 2024.xlsx

Kosongkan jika tidak ingin mengubah file saat edit.

File Metadata (Opsional)

Choose File

Metadata SPBE.xlsx

Kosongkan jika tidak ingin mengubah file metadata saat edit.

Tutup

Simpan

Judul dokumen menggunakan Tittle Case dan sudah sesuai formula penulisan

Deskripsi sudah sesuai

Operator OPD sudah mengunggah file metadata



**Satu Data
Maluku Utara**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA**